

Judul : RUU Ormas Antidemokrasi  
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 1

# RUU Ormas Antidemokrasi

Pemerintah dan DPR menantang uji materi ke MK.

STRI NOVARIA

**B**ILA tak ada aral melintang, Sidang Paripurna DPR hari ini akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Keasyarakatan (RUU Ormas). Peesahan RUU itu kembali memiktikan antara rakyat dan wakil ereka di Senayan masih berjakk, jauh panggang dari api. Betapa tidak? Sejak RUU itu gulirkan pemerintah hingga dimbut DPR, sejumlah kalangan enolak keras gagasan yang di nggap keblinger itu. "Jangan sampai nanti ada pemilikan arah jarum jam sejarah ke ah otoritarianisme dan represif i sangat berbahaya bagi masyarakat karena melemahkan konsodasi demokrasi Indonesia dan impersempit ruang partisipasi arga," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ersama sejumlah ormas di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan semangat pem-



MI/SUSANTO

**Din Syamsuddin**  
Ketua Umum PP Muhammadiyah

bahasan RUU Ormas sudah keliru sejak awal. "Disahkannya RUU Ormas justru bertolak belakang dengan UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan masyarakat diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul," tambahnya.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan pemerintah bergeming dengan sikap mereka. "Kami sepakat pemerintah akan jalan terus."

Terkait dengan penolakan ormas-ormas terhadap sejumlah pasal (lihat grafik), Mendagri mengaku sudah menampungnya. "Di-

akomodasi tim dari Kemendagri dan panitia khusus (pansus) dari DPR RI," tuturnya.

Gamawan menyarankan pihak yang merasa keberatan dengan UU Ormas tersebut mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Untuk menguji apakah benar atau salah UU itu," pungkasnya.

Sejauh ini sikap mayoritas fraksi *sami mawon* (sama saja) dengan pemerintah. "Tetap akan disahkan besok (hari ini). Kalau masih ada keberatan, masih ada ruang untuk *judicial review* ke MK," ungkap Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Setali tiga uang, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengaku sering berkomunikasi dengan ormas-ormas yang menentang. "Pasal-pasal yang dianggap represif sudah dihilangkan."

**Dengan catatan**

Pansus RUU Ormas DPR menggelar rapat terakhir untuk meminta pandangan dan persetujuan fraksi-fraksi pada Rabu (19/6). Dalam pandangan fraksi itu, delapan dari sembilan fraksi menyatakan setuju agar RUU Ormas itu segera disahkan. Hanya PAN yang menyatakan belum setuju.

Namun, sikap Fraksi PAN sebenarnya masih abu-abu. "Bukan menolak atau menerima, melainkan harus melakukan telaah lebih jauh," sergah Sekjen PAN Taufik Kurniawan.

Dalam pandangan Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya, RUU tersebut lebih banyak mengatur. "Seharusnya pemerintah memberdayakan gerakan sosial kemasyarakatan yang banyak tergabung dalam ormas."

Pada bagian lain, Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Bonar Simangunsong mengusulkan pembentukan dewan ormas untuk memberdayakan aspirasi masyarakat. "Lebih baik pemerintah membuat dewan ormas yang tugas dan fungsinya sama seperti Dewan Pers."

Komnas HAM merekomendasikan DPR tidak mengesahkan RUU Ormas. (Mad/Che/Pit/HH/X-5)